

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS KETAHANAN PANDEMI

OLEH: ANWAR, S.PdI, M.PdI

ABSTRAK

Pandemi merupakan sebuah wabah yang memberikan dampak begitu besar bagi kehidupan masyarakat saat ini. Ada berbagai aspek yang mengalami dampak dari adanya pandemi covid-19 ini, salah satunya adalah aspek ekonomi. Perlu adanya perbaikan pada sistem perekonomian Negara dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pada pelaksanaan perencanaan anggaran pembangunan berbasis ketahanan pandemi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, dll.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan perencanaan anggaran pembangunan berbasis ketahanan pandemi covid-19 sendiri dapat dilakukan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Pelaksanaan perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi sendiri dapat diwujudkan melalui penyaluran dana bantuan kepada masyarakat, penanganan masalah kesehatan masyarakat serta penyediaan fasilitas kesehatan, alokasi dana bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa upaya tersebut dapat membantu adanya pencapaian perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi yang sesuai dengan harapan. Beragam pelaksanaan upaya penyaluran dana anggaran pemerintah tersebut tentunya perlu dilakukan dengan adanya pengawasan dari kementerian terkait. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana anggaran yang harusnya didistribusikan dengan tepat kepada masyarakat.

Keyword: Perencanaan Anggaran, Pembangunan, Ketahanan Pandemi

A. PENDAHULUAN

Pandemi merupakan sebuah masalah nasional yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja, melainkan juga terjadi di berbagai Negara di seluruh belahan dunia. Sejak munculnya penyebaran virus covid-19 yang awalnya bernama virus corona pada tahun 2020 lalu dunia mengalami keterpurukan. Keterpurukan juga terjadi di Indonesia karena sejak awal munculnya virus covid-19 pada bulan Maret 2020 lalu virus ini terus meningkat penyebarannya. Ada banyak sekali kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang sudah mengalami masalah penyakit yang disebabkan oleh virus covid-19. Bahkan ada banyak sekali korban jiwa akibat adanya wabah virus covid-19 ini.

Wabah virus covid-19 ini pada dasarnya merupakan sebuah virus penyakit yang awalnya ditemukan di wilayah Wuhan, China. Namun, tidak lama setelah itu ada berbagai Negara yang kemudian mengalami gejala penyakit menyerupai gejala yang muncul di Wuhan. Inilah yang menjadi titik pangkal adanya penyebaran virus covid-19 yang hingga

saat ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Adanya virus covid-19 tentunya akan berdampak pada berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Negara. Termasuk juga dalam kaitannya dengan keterpurukan ekonomi nasional yang dihadapi oleh Indonesia.

Kemiskinan tentu menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di masa pandemi covid-19. Adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat yang menjadi kebijakan dari pemerintah tentunya membuat banyak warga miskin yang terdampak. Ada yang kehilangan pekerjaan akibat terjadinya PHK atau tidak dapat menjalankan usahanya karena adanya pembatasan kegiatan sosial yang diberlakukan. Bahkan hingga saat ini bisa dikatakan situasi ini sangatlah krusial untuk segera diatasi oleh pemerintah. Sehingga Indonesia tidaklah hanya bisa bertahan dari segi kesehatannya saja, melainkan juga dari segi ekonomi yang tersedia.

Tentu masalah tersebut menjadi sebuah hal yang sangatlah penting untuk terus diperhatikan oleh pemerintah. Masalah ekonomi memanglah menjadi sebuah masalah krusial dalam ketahanan sebuah Negara. Ketahanan sebuah Negara tidak hanya berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajahan dari luar saja, melainkan juga ada segi lain yang penting di perhatikan. Ketahanan juga bisa terjaga dengan baik jika didorong dengan adanya upaya perbaikan ekonomi yang terus diupayakan didalam negeri. Dengan begitu maka Indonesia akan bisa bertahan di masa pandemi dengan adanya ketahanan pangan yang diupayakan pada pandemi.

Perkembangan krisis kesehatan ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh pada ekonomi dunia yang kini terjadi. Tentu ini menjadi sebuah masalah yang harus segera diatasi dengan baik oleh pemerintah dalam menghadapi covid-19. Bahkan ada beberapa perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya beralih fungsi pada penganggaran ketahanan pandemi. Ini menjadi sebuah solusi penting yang harus diambil oleh pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan ekonomi akibat terdampak covid-19. Covid-19 menjadi sebuah wabah virus yang tidak hanya berdampak pada adanya krisis kesehatan saja di berbagai Negara. Namun ada beberapa dampak lainnya yang mungkin akan dihadapi oleh dunia salah satunya adalah depresi ekonomi.

Muhyidin (2020) menyatakan bahwa pandemi covid-19 sendiri dapat mengakibatkan terjadinya perlambatan, resesi, atau bahkan bisa mengakibatkan depresi ekonomi. Ini menjadi sebuah hal yang sangatlah berpengaruh pada tumbuh kembang perekonomian di sebuah Negara, termasuk juga Indonesia. Selama pandemi covid-19 ini terus berlangsung tentunya pemerintah telah berupaya secara maksimal dalam mempertahankan ketahanan di masa pandemi. Adanya kebijakan yang diberlakukan di Indonesia diharapkan tidak terlalu berdampak pada perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri melakukan modifikasi kebijakan dengan menerapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di setiap kota ataupun daerah yang memiliki kasus covid-19 yang dianggap parah. Prosedur ataupun aturan penyelenggaraan kebijakan PSBB diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Selain itu juga ada keputusan presiden

(Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang adanya penetapan kedaruratan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 lalu.

Sektor pertanian pada dasarnya memiliki peranan yang sangatlah besar dalam ketahanan pandemi di Indonesia. Nainggolan (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang ada di Indonesia pada tahun 2005 telah mencapai 219,3 juta yang pada dasarnya bisa meningkat sebesar 1,25 persen. Dengan begitu maka dapat dipastikan bahwa ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu kebijakan yang penting untuk dilakukan dalam menghadapi pandemi seperti saat ini. Pemerintah sendiri pada dasarnya harus melaksanakan adanya kebijakan pangan yaitu menjamin ketahanan pangan di masa pandemi. Semua itu meliputi adanya pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan juga organisasi pangan. Kebijakan tersebut diperlukan guna menciptakan adanya kemandirian pada diri masyarakat dalam mengelola perekonomian nasional.

Di masa pandemi seperti saat ini ketahanan pangan menjadi sebuah hal yang sangatlah krusial dalam menghadapi wabah virus covid-19. Adanya ketahanan pangan yang terjaga dengan baik tentu akan meningkatkan imunitas warga masyarakat, sehingga dapat lebih kuat dalam menghadapi wabah virus covid-19 ini. Mujahidin (2020) menjelaskan mengenai isi dari RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan adanya visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Terdapat setidaknya tujuh agenda pembangunan yang direncanakan guna mempertahankan ketahanan di masa pandemi. Tujuh agenda pembangunan tersebut diantaranya (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan juga berdaya saing, (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi yang perlu dipertimbangkan pemerintah. Kebijakan pangan di masa pandemi tentunya menjadi salah satu pertimbangan penting yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah virus covid-19 ini. Hirawan (2020) menyebutkan bahwa ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu hal yang paling krusial dalam menghadapi pandemi covid-19 ini tentunya. Pangan menjadi sebuah hal yang harus benar benar di perhatikan oleh pemerintah untuk bisa tetap mempertahankan kesejahteraan nasional di masa pandemi. Sebab, pangan menjadi titik penting dalam perjalanan kehidupan manusia yang akan menunjang segi kesehatan yang dimiliki.

Dari penjelasan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi mengenai perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk bisa mewujudkan perencanaan anggaran berbasis ketahanan pangan di masa pandemi covid-19.

Manfaat dari penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan yang penting bagi beberapa pihak. Sehingga dapat membantu stabilitas ketahanan nasional dalam menghadapi masa pandemi covid-19 seperti saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya merupakan sebuah penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sebuah metode penelitian dengan cara mengumpulkan beragam teori yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Masalah masalah penelitian tentunya bersifat universal dan dapat diselesaikan dengan tinjauan kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti. Masalah yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah “Mewujudkan Perencanaan Anggaran Berbasis Ketahanan Pandemi”.

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau library research sendiri adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen terkait. Dokumen yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah penelitian tentu dapat diambil melalui buku, jurnal, ataupun artikel yang membantu. Bahan bahan pustaka yang relevan tentunya akan membantu peneliti untuk dapat menggambarkan masalah penelitian dengan lebih jelas. Sumber sumber lainnya yang relevan tentunya dapat dijadikan sebagai bahan dalam membuat tulisan ilmiah ini.

Penelitian ini bersifat sistematis karena menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara runtun dan terarah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah mencari bahan bahan dari sumber data yang tersedia. Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan baik yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber sekunder sendiri merupakan pokok bahasan yang menjadi inti dari permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. Sedangkan, sumber sekunder sendiri adalah beragam informasi yang dapat membantu peneliti menguraikan permasalahan dengan baik. Artinya, sumber sekunder sendiri merupakan bahan bahan yang memiliki keterkaitan dengan data primer yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah menguji kebenaran dari masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengujian kebenaran dari permasalahan peneliti tentunya dapat dibuktikan dengan mengumpulkan beragam sumber data yang terkait. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai pembahasan tentang bagaimana cara “Mewujudkan Perencanaan Anggaran Berbasis Ketahanan Pandemi”. Pertama tentu peneliti akan menentukan desain penelitian dengan tepat, kemudian akan dilakukan pencarian data pokok atau bisa dikatakan sebagai

data primer, setelah itu akan dilakukan pencarian pengetahuan kontekstual yang menguatkan permasalahan dalam penelitian tentunya.

C. PEMBAHASAN

1. Ketahanan Pangan di masa Pandemi covid-19

Petani pada dasarnya memiliki peranan yang sangatlah penting dalam pasokan pangan di masa pandemi covid-19 ini. Adanya pengembangan produksi pertanian yang terus ditingkatkan tentu nantinya dapat menjadi salah satu solusi permasalahan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Ketahanan pangan di masa Pandemi covid-19 pada dasarnya dapat diwujudkan dengan meningkatkan fasilitas produksi dan juga konsumsi yang ada di sektor pangan. Penyesuaian pasokan pangan yang ada di masa pandemi covid-19 ini tentunya bersifat masif, dalam hal ini pemerintah perlu untuk menyelesaikan permasalahan pangan yang terjadi. Berbagai fasilitas produksi seperti mesin, pemberian subsidi pupuk dan juga benih menjadi skala prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Tentu perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi covid-19 sendiri dapat diwujudkan pada upaya perlindungan pada ketahanan pangan nasional. Tentu perlu adanya beragam solusi yang dapat membantu terjaminnya kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan pasokan pangan. Dalam mewujudkan perencanaan anggaran berbasis ketahanan pangan di masa pandemi tentunya kementerian pertanian dan dinas pertanian terkait perlu terus melakukan pengawasan. Sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih optimal dalam menjaga ketahanan pangan yang penting dilakukan pada masa pandemi covid-19 ini.

Hirawan (2020) menjelaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa komoditas penting dalam rantai makanan masyarakat saat ini. Seperti padi, jagung, bawang, dan juga cabai tentunya menjadi salah satu komoditas yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan penting pemerintah. Karena selama ini pasokan bahan pangan tersebut dilakukan melalui proses impor dan sejak pandemi covid-19 pasokannya tidak mencukupi. Penting bagi pemerintah untuk mengupayakan adanya ketahanan pangan pada penyediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Ketersediaan dan juga pasokan harga pangan sendiri menjadi salah satu hal lain yang juga penting diperhatikan oleh pemerintah. Sejak pandemi covid-19 merebak di berbagai wilayah yang ada di Indonesia sendiri tentu ketersediaan pasokan pangan terus mengalami ketidakstabilan. Ini menjadi sebuah masalah krusial yang pada dasarnya penting untuk dipahami oleh setiap orang dalam upaya penanganan ketahanan pangan tentunya. Dengan begitu permasalahan ketahanan pangan yang ada di Indonesia bisa dipastikan bisa terselesaikan dengan baik tentunya.

2. Perawatan kesehatan berbasis komunitas

Ketahanan nasional perlu dilakukan sebagai upaya untuk dapat mengatasi permasalahan dengan adanya wabah covid-19. Tentu ada beberapa aspek yang penting diperhatikan dalam menjaga ketahanan nasional di masa pandemi covid-19. Salah satu hal yang paling krusial adalah pada masalah perawatan kesehatan yang berbasis komunitas. IFRC (2020) menyatakan bahwa perawatan kesehatan yang berbasis komunitas sendiri pada dasarnya menjadi salah satu hal yang sangatlah krusial diberikan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan sendiri yang berbasis komunitas tentunya mencakup adanya layanan yang diberikan oleh berbagai tenaga kesehatan yang tersedia. Tentunya beragam pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh para tenaga kesehatan sesuai dengan pelatihan dan juga kapasitas yang dimiliki.

Setiap orang yang terkait dengan perawatan kesehatan yang berbasis komunitas sendiri pada dasarnya meliputi tenaga kesehatan baik awam maupun yang sudah professional, formal ataupun informal, dibayar ataupun tidak dibayar, serta tenaga yang berbasis di fasilitas dan juga mendukung serta mengawasi dan juga memberikan layanan serta kampanye penjangkauan. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi tentunya pelaksanaan ketahanan sistem kesehatan masyarakat menjadi sebuah hal yang penting. Pemerintah perlu berupaya untuk mengalokasikan dana anggaran terhadap perencanaan kestabilan sistem kesehatan yang ada di Indonesia.

Saat ini ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengalokasian dana anggaran kesehatan Negara. Salah satu yang paling jelas terlihat saat ini adalah pada adanya perencanaan vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah. Semua masyarakat tentunya menjadi objek sasaran dari vaksinasi massal yang hingga saat ini diberlakukan di Indonesia. Mulai dari tenaga kesehatan, PNS, karyawan sipil, hingga masyarakat biasa tentunya perlu mendapatkan vaksinasi dalam perencanaan anggaran yang dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam terlaksananya sistem penanganan pandemi covid-19 secara optimal.

3. Kebijakan fiskal pada alokasi dana bantuan kepada masyarakat

Juliani (2020) menyatakan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk dapat membuat kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu pejabat dalam hal ini memiliki kebebasan dalam bertindak dalam mengatasi persoalan yang konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 ini sangatlah diperlukan karena pastinya terdapat suatu kondisi yang bisa dikatakan mendesak/ tidak dapat ditunda lagi. Dimana pemerintah perlu untuk melakukan beberapa hal yang dilakukan langsung oleh pejabat pemerintahan dalam upaya penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik itu tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya adanya kebijakan

fiskal ini ditujukan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional dalam menangani masalah covid-19.

Berdasar pada Pasal 34 UUD 1945 tentunya pemerintah/ Negara diberikan tanggung jawab untuk dapat melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi setiap rakyatnya. Hal hal yang terkait diantaranya adalah (1) fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan juga tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara juga bertanggung jawab pada penyediaan fasilitas pelayanan umum, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur didalam Undang Undang.

Tentu dalam kaitannya dengan penyaluran anggaran belanja Negara ditahun 2020 hingga 2021 perlu dilakukan pengawasan secara tepat. Termasuk juga dalam kaitannya dengan adanya penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19. Penyaluran dana bantuan sosial tersebut tentunya perlu untuk benar benar diperhatikan dengan baik oleh para pejabat pemerintah. Pemerataan sistem bantuan sosial yang diberlakukan di Indonesia tentu dapat menjadi salah satu upaya perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi yang krusial untuk dilakukan. Sesuai dengang Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

D. SIMPULAN

Dari pemaparan yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan perencanaan anggaran pembangunan berbasis ketahanan pandemi covid-19 sendiri dapat dilakukan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Pelaksanaan perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi sendiri dapat diwujudkan melalui penyaluran dana bantuan kepada masyarakat, penanganan masalah kesehatan masyarakat serta penyediaan fasilitas kesehatan, alokasi dana bantuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Beberapa upaya tersebut dapat membantu adanya pencapaian perencanaan anggaran berbasis ketahanan pandemi yang sesuai dengan harapan. Beragam pelaksanaan upaya penyaluran dana anggaran pemerintah tersebut tentunya perlu dilakukan dengan adanya pengawasan dari kementerian terkait. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana anggaran yang harusnya didistribusikan dengan tepat kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hirawan, F.B. (2020). *Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid-19*. CSIS Commentaries: 14 April 2020.
- IFRC. (2020). *Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas, Termasuk Penjangkauan dan Kampanye, dalam Konteks Pandemi Covid-19*.
- Juliani, Henny. (2020). *Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 3 No 4
- Muhyiddin. (2020). *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. *The Indonisme Journal of Development Planning*. Vol IV No 2